

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN HASIL AUDIT
LAPORAN KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KORUPSI
PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA**

(Tesis)

Oleh

CHRISTINE CININTYA

NPM 2021031017



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PENGARUH TRANSPARANSI DAN HASIL AUDIT LAPORAN KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KORUPSI PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA

Oleh

CHRISTINE CININTYA

Penelitian ini dilatarbelakangi terjadinya peningkatan jumlah korupsi beriringan dengan peningkatan transparansi, opini audit, tindak lanjut hasil audit, serta penurunan jumlah temuan audit. Hal lain yang menjadi latar belakang adalah keberagaman hasil penelitian sebelumnya terkait topik pengaruh opini audit serta tindak lanjut hasil audit terhadap korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan hasil audit terhadap tingkat korupsi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat korupsi yang diukur dengan jumlah kasus berdasarkan Laporan Tahunan Kejaksaan Agung. Variabel independen dalam penelitian ini adalah transparansi yang diukur dengan keterbukaan dokumen pada situs web pemerintah provinsi, serta opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel berupa data pemerintah provinsi di Indonesia selama 8 tahun, yaitu Tahun 2013 – 2020. Jumlah sampel penelitian adalah 224 sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel, dan uji hipotesis. Uji data pada penelitian ini menggunakan aplikasi Eviews versi 12. Hasil pengujian menunjukkan transparansi berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi dan temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi, sedangkan opini audit dan tindak lanjut hasil audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

Kata kunci: transparansi, opini audit, temuan audit, tindak lanjut hasil audit, tingkat korupsi

ABSTRACT

EFFECT OF TRANSPARENCY AND AUDIT RESULTS FINANCIAL STATEMENTS ON THE LEVEL OF CORRUPTION IN THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF INDONESIA

By

CHRISTINE CININTYA

This research is caused by a situation when the number of corruption increased along with increasing in transparency, audit opinion, follow-up on audit results, and decreasing in the number of audit findings. Another thing that becomes the background is the diversity of previous research results related to the topic of the influence of audit opinions and the follow-up of audit results on corruption. This study aims to determine the effect of transparency and audit results on the level of corruption. The dependent variable in this study is the level of corruption as measured by the number of cases based on the Annual Report from The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. The independent variable in this study is transparency as measured by the disclosure of documents on the provincial government website, also audit opinions, audit findings, and follow-up on audit results based on the Summary of Semester Examination Result from The Audit Board of the Republic of Indonesia.

The data used in this study is panel data in the form of provincial government data in Indonesia for 8 years, from 2013 to 2020. The number of research samples is 224 samples. The data analysis technique used is descriptive statistical analysis, classical assumption test, panel data regression analysis, and hypothesis testing. The test data in this study uses the Eviews version 12. The test results show that transparency has a negative effect on the level of corruption and audit findings have a positive effect on the level of corruption, while audit opinion and follow-up audit results do not affect the level of corruption.

Keywords: transparency, audit opinion, audit findings, follow-up on audit results, level of corruption

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN HASIL AUDIT
LAPORAN KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KORUPSI
PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA**

Oleh

CHRISTINE CININTYA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER AKUNTANSI**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

Judul Tesis : **PENGARUH TRANSPARANSI DAN HASIL AUDIT LAPORAN KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KORUPSI PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Christine Cinintya**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2021031017

Program Studi : **Magister Ilmu Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Ron
Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.
NIP 19750620 200012 2 001

Fitra
Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.
NIP 19761023 200212 1 002

2. Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi

Ron
Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.
NIP 19750620 200012 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.

Sekretaris : Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.

Penguji Utama : Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.

Anggota Penguji : Dr. Mega Metalia, S.E., M.S.Ak., Akt.

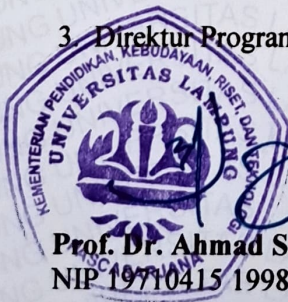
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003

3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP 19710415 199803 1 005

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 31 Agustus 2022



Rendi
[Signature]
[Signature]
[Signature]

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Christine Cinintya

NPM : 2021031017

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul "Pengaruh Transparansi dan Hasil Audit Laporan Keuangan terhadap Tingkat Korupsi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia" telah disusun dengan sungguh-sungguh dan merupakan hasil karya sendiri. Saya tidak melakukan plagiarisme atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 31 Agustus
2022

Penulis



Christine Cinintya

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Jakarta pada 14 Oktober 1986 sebagai anak bungsu dari 2 bersaudara pasangan Bapak S. Bontong dan Ibu E. Larasati. Penulis menikah dengan Bakti W. S. dan dianugerahkan seorang putri bernama Danya E. L.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak Ricci II pada Tahun 1992, Sekolah Dasar Ricci II pada Tahun 1998, Sekolah Menengah Pertama Ricci II pada Tahun 2001, dan Sekolah Menengah Atas Tarakanita I pada Tahun 2004. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana strata satu di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya dan lulus pada 12 Maret 2009 dengan gelar Sarjana Ekonomi.

Penulis bekerja sebagai auditor di KPMG Indonesia sampai dengan Tahun 2010. Sejak Mei 2010 sampai dengan saat ini, penulis bekerja sebagai pemeriksa di BPK. Pendidikan lanjutan jenjang strata dua dijalani oleh penulis di Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sejak September 2020 melalui program beasiswa dari LPDP dan penugasan belajar dari BPK, serta berhasil lulus pada 31 Agustus 2022.

MOTTO

“Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances;

for this is the will of God in Christ Jesus for you”

(1 Thessalonians 5: 16 – 18)

“Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya,

maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu”

(Matius 6: 33)

“Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu

seperti untuk Allah dan bukan untuk manusia”

(Kolose 3: 23)

Jesus looked at them and said,

“With man it is impossible, but not with God.

For **all things are possible with God**”.

(Mark 10: 27)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah Sumber Kehidupan,
yang senantiasa mencurahkan berkatNya,
kupersembahkan karya ini untuk:

Papa, Mama dan Kakakku yang terkasih,

Suami dan Anakku yang tercinta,

Seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan,

Seluruh sahabat yang telah menemani perjalanan ini,

dan almamaterku.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul “Pengaruh Transparansi dan Hasil Audit Laporan Keuangan terhadap Tingkat Korupsi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia”. Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

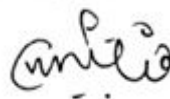
1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi serta Dosen Pembimbing Utama, atas waktu, dukungan, perhatian, serta nasihat yang diberikan dengan penuh kesabaran sejak awal pemilihan topik hingga akhir penyusunan tesis ini.
4. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Kedua, atas waktu, nasihat, serta bimbingan yang diberikan sejak awal pencarian artikel rujukan hingga akhir penyusunan tesis ini.
5. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Penguji Utama, yang telah memberikan evaluasi yang bermanfaat untuk penyelesaian tesis ini.
6. Ibu Dr. Mega Metalia, S.E., M.S.Ak., Akt., selaku Dosen Penguji Kedua, yang telah memberikan saran dan arahan yang membangun untuk penyelesaian tesis ini.
7. Ibu Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Ph.D., Akt., selaku Pembimbing Akademik, atas dukungan dan doa selama masa perkuliahan.

8. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, pembelajaran, bantuan, dan layanan terbaik selama penulis menempuh pendidikan.
9. Papa, mama dan kakak terkasih untuk setiap kasih sayang dan doa yang tak pernah putus, serta untuk motivasi menempuh pendidikan ini.
10. Suami dan anak tercinta yang selalu memberi senyuman serta pelukan agar penulis semangat belajar, juga selalu sabar memberikan waktu saat penulis menyelesaikan tugas mata kuliah serta tesis.
11. Bapak, ibu, mas, mbak, adik, keponakan tersayang yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan doa bagi penulis.
12. Seluruh keluarga besar yang telah memanjatkan doa untuk keberhasilan penulis menyelesaikan pendidikan.
13. Sahabat dengan percakapan yang selalu menambah semangat dan menjadi pengingat bahwa tak sendiri dalam perjuangan ini: M.Ak. Fighters, Mie Donat Semangka Boba Publik, Class PJJ, Tim Banner Sticker M.Ak., dan MIA 2020.
14. Sahabat di Chicasoke, Gangster Cantik, Apalah Apalah, Lunch 30 Des, LPDP PK-163, Cewek Rumpi dan seluruh rekan yang telah memberikan dukungan.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan dan doa yang diberikan.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 31 Agustus 2022

Penulis,



Christine Cinintya

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
BAB I	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II.....	7
2.1. Tinjauan Pustaka	7
2.1.1. Teori Keagenan.....	7
2.1.2. Teori Sinyal.....	8
2.1.3. Korupsi.....	9
2.1.4. Transparansi.....	11
2.1.5. Hasil Audit.....	14
2.2. Penelitian Terdahulu.....	17
2.3. Pengembangan Hipotesis	20
2.3.1. Pengaruh Transparansi terhadap Tingkat Korupsi.....	20
2.3.2. Pengaruh Hasil Audit terhadap Tingkat Korupsi.....	22
2.4. Model Penelitian.....	25
BAB III	26
3.1. Jenis Penelitian	26
3.2. Populasi dan Metode Pengambilan Sampel	26

3.3.	Jenis dan Sumber Data	27
3.4.	Variabel Penelitian	27
3.4.1.	Tingkat korupsi	27
3.4.2.	Transparansi.....	28
3.4.3.	Opini Audit	28
3.4.4.	Temuan Audit	29
3.4.5.	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit	29
3.4.6.	Operasionalisasi Variabel	29
3.5.	Teknik Analisis Data	30
3.5.1.	Analisis Statistik Deskriptif.....	30
3.5.2.	Uji Asumsi Klasik.....	31
3.5.3.	Analisis Regresi Data Panel.....	32
3.5.4.	Uji Hipotesis	34
BAB IV	36
4.1.	Hasil.....	36
4.1.1.	Statistik Deskriptif	36
4.1.2.	Uji Asumsi Klasik.....	41
4.1.3.	Regresi Data Panel.....	42
4.1.4.	Uji Hipotesis	43
4.2.	Pembahasan	45
4.2.1.	Pengaruh Transparansi terhadap Tingkat Korupsi.....	45
4.2.2.	Pengaruh Hasil Audit terhadap Korupsi	48
BAB V	53
5.1.	Simpulan.....	53
5.2.	Kontribusi Penelitian	54
5.3.	Keterbatasan Penelitian	54
5.4.	Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	17
2. Sampel Penelitian	26
3. Operasionalisasi Variabel	30
4. Statistik Deskriptif	36
5. Uji Multikolinearitas	41
6. Uji Autokorelasi	42
7. Uji Heteroskedastisitas	42
8. Uji Chow dan Uji Hausman	43
9. Model <i>Fixed Effect</i>	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Perkembangan CPI Indonesia	2
2. Jumlah Temuan Audit Periode 8 Tahun Terakhir	3
3. Perkembangan Penyelesaian Rekomendasi Audit	4
4. Model Penelitian	25
5. Rata-rata Korupsi per Tahun	36
6. Rata-rata Transparansi per Tahun	37
7. Perkembangan Opini WTP	38
8. Jumlah Temuan Audit pada Sampel Penelitian	39
9. Persentase TLRHP	40

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APH	: Aparat Penegak Hukum
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
CALK	: Catatan atas Laporan Keuangan
CPI	: <i>Corruption Perception Index</i>
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
ICW	: <i>Indonesia Corruption Watch</i>
IHPS	: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
LAK	: Laporan Arus Kas
LHKPN	: Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LKIP	: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LM	: Lagrange <i>Multiplier</i>
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
LPSAL	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
Tipikor	: Tindak Pidana Korupsi
TI	: <i>Transparency International</i>
TLRHP	: Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

TMP	: Tidak Menyatakan Pendapat
TW	: Tidak Wajar
VIF	: <i>Variance Inflation Factor</i>
WDP	: Wajar dengan Pengecualian
WTP	: Wajar tanpa Pengecualian

BAB I

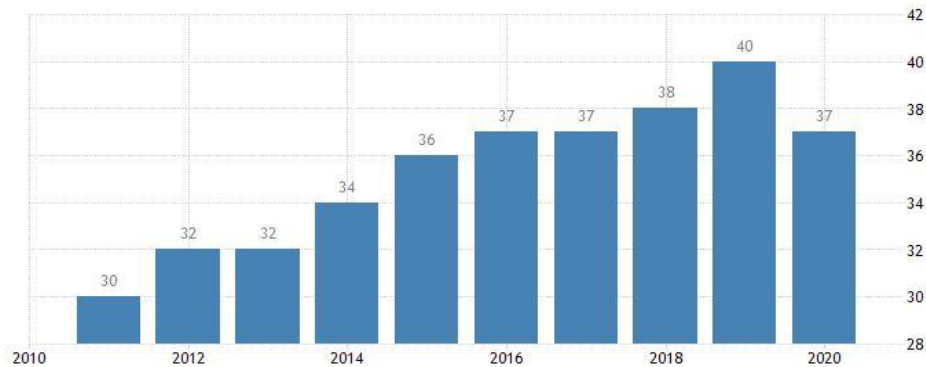
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Praktik korupsi yang semakin marak, terutama pada kawasan negara berkembang, telah memprakarsai reformasi antikorupsi yang didukung oleh komunitas internasional. Namun, hingga saat ini, keberhasilan dari praktik antikorupsi masih sangat minim sehingga tingkat korupsi sebelum dan saat reformasi masih memiliki kondisi yang sama. Salah satu hal yang menyebabkan minimnya keberhasilan praktik antikorupsi ialah korupsi dilakukan secara kolektif dan sistemik (Persson *et al.*, 2012).

Transparency International/TI menyatakan terdapat penurunan *Corruption Perception Index*/CPI Indonesia Tahun 2020. Penurunan ini terlihat dari indeks Tahun 2020 senilai 37, setelah Tahun 2019 Indonesia mencapai indeks 40. CPI berskala 0 – 100, dengan 0 mencerminkan negara sangat korup dan 100 mencerminkan negara sangat bersih. Rilis CPI 2020 menempatkan Indonesia pada urutan ke-102 dari 180 negara. Data untuk negara kawasan Asia Tenggara, menunjukkan Indonesia berada di urutan ke-5 setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, serta Timor Leste (Ramadhan, 2021). Ketua Dewan Pengawas TI Indonesia menjelaskan area yang harus diperhatikan terkait tingkat korupsi di Indonesia antara lain sektor penegakan hukum dan perbaikan layanan, serta sektor integritas politik dan kualitas demokrasi (Berita KPK, 2021). Perkembangan CPI Indonesia selama 10 tahun tersaji pada Gambar 1. Gambar tersebut menunjukkan perbaikan dalam 9 tahun terakhir, sebelum penurunan CPI Tahun 2020.

Gambar 1. Perkembangan CPI Indonesia



Sumber: <https://tradingeconomics.com/indonesia/corruption-index>

Penurunan peringkat CPI tersebut selaras dengan kenaikan jumlah kasus korupsi yang diungkap oleh *Indonesia Corruption Watch/ICW*. Laporan ICW Tahun 2020 menyatakan jumlah kerugian negara/daerah sebesar Rp18,6 triliun, yang jauh lebih besar dibanding nilai tahun sebelumnya sebesar Rp8,4 triliun. Korupsi menjadi salah satu aspek yang muncul saat terjadi reformasi pemerintahan di Indonesia. Pemerintah melakukan desentralisasi kewenangan pengelolaan keuangan daerah agar pemerintah daerah dapat melaksanakan proses pengambilan keputusan. Kebijakan ini merupakan upaya menekan korupsi. Namun, seiring berjalannya desentralisasi, hal ini menimbulkan varian penyalahgunaan terhadap APBD oleh pihak eksekutif serta legislatif. Berbagai praktik korupsi yang dilakukan di pemerintah daerah berawal dari masalah dasar, yakni kurangnya transparansi dalam manajemen anggaran (Gedeona, 2005).

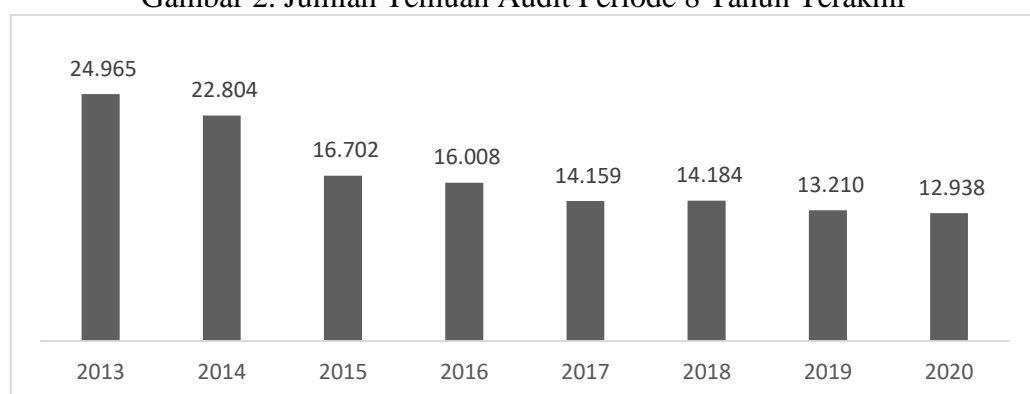
Transparansi merupakan salah satu upaya bagi prinsipal, yaitu masyarakat, untuk mengontrol kinerja dari agen, yaitu pemerintah. Konsep ini berhubungan dengan ketersediaan informasi sehingga masyarakat mudah melakukan pengawasan atas kegiatan pemerintah (Lindstedt & Naurin, 2006). Transparansi merupakan proses pemberian informasi keuangan. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui dengan terbuka serta menyeluruh pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan anggaran (Peraturan Pemerintah Nomor 71, Tahun 2010). Transparan yang dimaksud ialah keterbukaan informasi agar masyarakat dapat memiliki akses secara mudah ke data keuangan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 12, Tahun 2019). Peraturan yang mewajibkan keterbukaan informasi membuat transparansi terkait pengelolaan APBD mulai dilakukan oleh pemerintah-

pemerintah daerah. Transparansi dapat terlihat dari keterbukaan informasi laporan keuangan Tahun 2020 di beberapa situs web pemerintah daerah, seperti situs web milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara, dengan rincian pada Lampiran 1.

BPK melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah daerah, dan selanjutnya menerbitkan LHP. Pada Tahun 2021, terdapat LHP yang menunjukkan peningkatan opini atas pengelolaan keuangan Tahun 2020 dibanding Tahun 2019 pada beberapa pemerintah daerah, dengan rincian pada Lampiran 2. Selain itu, IHPS I Tahun 2021 menunjukkan 33 dari 34 provinsi di Indonesia menerima opini WTP atas laporan keuangan Tahun 2020.

LHP menyajikan antara lain opini, laporan keuangan, serta temuan terkait kelemahan SPI dan pelanggaran terhadap peraturan. Peningkatan temuan terkait kelemahan SPI dapat menimbulkan terjadinya peningkatan korupsi. Temuan atas pelanggaran terhadap peraturan berpengaruh positif terhadap korupsi. Peningkatan temuan pemeriksaan berupa pelanggaran peraturan mengindikasikan tingkat korupsi yang tinggi (Masyitoh *et al.*, 2015). Temuan pemeriksaan Tahun 2013 – 2020 yang diungkap dalam IHPS menunjukkan penurunan jumlah temuan selama periode tersebut atas pemeriksaan pada seluruh pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Perkembangan jumlah temuan pemeriksaan selama 8 tahun terakhir tersaji pada Gambar 2.

Gambar 2. Jumlah Temuan Audit Periode 8 Tahun Terakhir

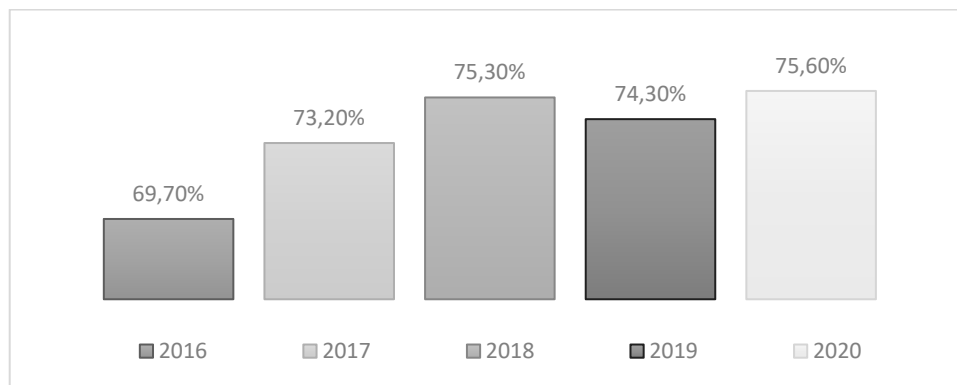


Sumber: IHPS I dan II Tahun 2013 – 2020 (data diolah dengan Microsoft Excel)

Tindak lanjut atas rekomendasi audit merupakan cara guna meningkatkan efektivitas dari proses audit (Liu & Lin, 2012). Rekomendasi pemeriksaan

diharapkan bisa menghentikan dan mencegah terjadinya kembali pelanggaran yang ditemukan (Umar, 2012). Temuan audit tidak memiliki manfaat apabila tidak dilanjutkan dengan pelaksanaan rekomendasi (Isnadiva & Haryanto, 2021). IHPS yang diterbitkan BPK menunjukkan peningkatan persentase rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dari Tahun 2019, sebanyak 74,30%, ke Tahun 2020, sebanyak 75,60%. Perkembangan persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi audit tersaji pada Gambar 3.

Gambar 3. Perkembangan Penyelesaian Rekomendasi Audit



Sumber: Ringkasan Eksekutif IHPS II Tahun 2016 – 2020

Fenomena berupa peningkatan jumlah korupsi beriringan dengan peningkatan transparansi, peningkatan opini audit, penurunan temuan audit serta peningkatan TLRHP menunjukkan perbedaan dengan pernyataan dari beberapa peneliti. Penelitian menggunakan data panel pada provinsi di China menunjukkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi audit memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat korupsi, serta temuan pemeriksaan memiliki pengaruh positif pada tingkat korupsi (Liu & Lin, 2012). Penelitian atas data panel dari 75 negara menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dapat menurunkan korupsi sehingga transparansi dapat membawa pemerintahan ke arah lebih baik (Brusca *et al.*, 2018). Hal ini menjadi urgensi penelitian guna mengetahui secara empiris apakah transparansi dan hasil audit berpengaruh pada korupsi di Indonesia.

Pada Tahun 2012, Jin Liu dan Bin Lin melakukan penelitian menggunakan data panel Tahun 1999 - 2008 untuk mengetahui peran audit pemerintah di China secara empiris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa jumlah ketidakteraturan yang ditemukan selama proses audit berhubungan positif dengan korupsi.

Penelitian tersebut juga menunjukkan tindakan perbaikan setelah audit berhubungan negatif dengan korupsi (Liu & Lin, 2012).

Brusca, Rossi, dan Aversano pada Tahun 2018 melakukan penelitian menggunakan data panel dari 75 negara untuk menguji hubungan antara transparansi dengan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi mempengaruhi korupsi. Politisi dapat meningkatkan pengungkapan informasi akuntansi guna meningkatkan kualitas manajemen publik dan menurunkan persepsi korupsi (Brusca *et al.*, 2018).

Latar belakang lain pada penelitian ini adalah hasil penelitian sebelumnya yang masih beragam. Studi pada 15 pemerintah kota di Sumatera menunjukkan opini audit atas LKPD memiliki pengaruh positif pada korupsi di pemerintah daerah (Khairudin & Erlanda, 2016). Penelitian terhadap data pemerintah kabupaten dan kota periode Tahun 2012 dan 2013 menunjukkan opini audit memiliki pengaruh pada persepsi bersih korupsi (Ikhwan *et al.*, 2016). Penelitian dengan data Tahun 2016 - 2018 menunjukkan opini pemeriksaan tidak memiliki pengaruh pada korupsi di pemerintah daerah (Warkini *et al.*, 2020).

Hasil penelitian beragam juga terlihat di topik pengaruh pelaksanaan rekomendasi audit terhadap tingkat korupsi. Penelitian atas data dari pemerintah provinsi di Indonesia menunjukkan upaya pemenuhan rekomendasi audit berpengaruh negatif terhadap korupsi (Rini & Damiati, 2017). Penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian pada data kementerian dan lembaga di Indonesia yang menghasilkan bahwa pelaksanaan rekomendasi audit tidak berpengaruh terhadap korupsi (Budiman & Amyar, 2021). Selain itu, studi pada data pemerintah daerah Tahun 2015 - 2018 menunjukkan TLRHP berpengaruh positif terhadap korupsi (Isnadiva & Haryanto, 2021).

Latar belakang yang telah dijelaskan mendorong penelitian untuk menguji Pengaruh Transparansi dan Hasil Audit Laporan Keuangan terhadap Tingkat Korupsi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. Kebaharuan penelitian ini ialah penelitian atas data pemerintah provinsi di Indonesia dengan kurun waktu Tahun 2013 – 2020, serta pengukuran transparansi melalui keterbukaan informasi yang mengacu ke Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pengukuran transparansi pada pemerintah provinsi

dengan peraturan tersebut menjadi kontribusi penelitian ini. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan proses transparansi di pemerintah provinsi.

1.2. Rumusan Masalah

Uraian latar belakang menunjukkan pokok permasalahan di penelitian ini yaitu:

1. Apakah transparansi memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi?
2. Apakah hasil audit memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh transparansi terhadap tingkat korupsi.
2. Mengetahui pengaruh hasil audit terhadap tingkat korupsi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis guna menjadi referensi dalam pengembangan ilmu akuntansi pada sektor publik berkaitan dengan perannya menurunkan korupsi yang masih marak terjadi di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan mampu memberi masukan bagi kegiatan penelitian mengenai pentingnya transparansi serta hasil audit bagi akuntansi sektor publik.
2. Secara praktis untuk menyumbang referensi bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan mengenai upaya penanganan korupsi di wilayah kewenangannya. Hasil penelitian diharapkan mampu memberi masukan bagi entitas yang berwenang dalam menentukan pedoman berkaitan dengan transparansi serta hasil audit pada sektor publik di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Teori Keagenan

Teori keagenan berkaitan dengan hubungan kontraktual yang ada antara prinsipal dengan agen. Hubungan ini terjadi pada dua atau lebih entitas. Prinsipal merupakan pihak pengambil keputusan serta pemberi wewenang ke agen guna melakukan aktivitas atas nama prinsipal. Hal utama dari teori ini yaitu kontrak kerja yang dirancang guna menyelaraskan antara kepentingan prinsipal dengan agen (Jensen & Meckling, 1976).

Teori ini menekankan penyelesaian 2 masalah, yaitu masalah keagenan serta pembagian risiko. Masalah keagenan ketika tujuan agen dan prinsipal bertentangan, dan prinsipal menghadapi kesulitan dalam verifikasi hasil kerja agen. Masalah pembagian risiko ketika prinsipal dan agen mempunyai preferensi dan sikap yang berbeda terhadap suatu risiko. Asumsi mengenai teori keagenan:

1. Asumsi terkait sifat manusia: manusia memiliki kecenderungan mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasionalitas, serta menghindari risiko.
2. Asumsi terkait organisasi: asumsi berupa konflik diantara anggota organisasi, efisiensi yang dijadikan kriteria penilaian produktivitas, serta informasi asimetri.
3. Asumsi terkait informasi: asumsi yang menyatakan bahwa informasi merupakan suatu hal yang dapat diperjualbelikan (Eisenhardt, 1989).

Asumsi tersebut menjadikan manusia berlaku oportunistis atau mengutamakan kepentingan pribadi dibanding organisasi. Agen memiliki motivasi peningkatan kompensasi serta jenjang karir, sedangkan prinsipal memiliki motivasi guna meningkatkan utilitas dan profitabilitas. Konflik ini dapat senantiasa mengalami

peningkatan karena prinsipal tidak dapat memantau aktivitas agen setiap hari. Sebaliknya, agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas organisasi dan lingkungan kerja secara keseluruhan. Hal tersebut berakibat adanya informasi asimetri atau kepemilikan informasi yang tidakimbang antara prinsipal dengan agen (Eisenhardt, 1989).

Teori keagenan digunakan sebagai acuan penelitian ini untuk menjelaskan permasalahan diantara pemerintah daerah, yang bertindak sebagai agen, dengan masyarakat, selaku prinsipal, berkaitan dengan pengelolaan APBD. Teori keagenan menyatakan bahwa informasi asimetri terjadi karena pemerintah sebagai agen memiliki lebih banyak informasi terkait sumber daya yang dikelolanya dibandingkan dengan masyarakat. Asimetri ini memungkinkan adanya tindak korupsi oleh agen.

Pengawasan terhadap aktivitas pemerintah dilakukan guna memastikan sumber daya dikelola dengan mematuhi peraturan berlaku. Hal ini perlu dilakukan sebagai konsekuensi adanya permasalahan keagenan. Pengawasan dapat berupa pemeriksaan atas laporan keuangan. Selain itu, peningkatan transparansi oleh pemerintah diperlukan untuk menurunkan informasi asimetri (Damiani, 2016).

2.1.2. Teori Sinyal

Teori sinyal menjelaskan bahwa pengirim sinyal/pemilik informasi ingin memberi isyarat/sinyal berupa informasi atas keadaan organisasi yang memiliki manfaat untuk penerima sinyal/pengguna informasi (Spence, 1973). Teori ini berpendapat bahwa pemerintah (pihak yang menerima amanat dari rakyat) ingin memberikan sinyal ke masyarakat. Hal ini bertujuan agar rakyat bisa mengetahui dan mendukung aktivitas pemerintahan sehingga dapat berjalan baik. Laporan keuangan merupakan sarana untuk memberi sinyal kepada masyarakat. selain itu, kinerja pemerintah perlu diinformasikan ke rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban serta promosi untuk kepentingan politik (Evans III & Patton, 1987).

Teori sinyal menjelaskan bahwa pemerintah ingin memberikan sinyal baik ke masyarakat. Pemerintah memiliki permintaan dari masyarakat guna memberi informasi terkait capaian pemerintah. Teori ini membantu pemerintah serta

masyarakat untuk menurunkan tingkat informasi asimetri. Pemerintah menurunkan tingkat informasi asimetri dengan memberi isyarat ke masyarakat berupa penyampaian laporan keuangan berkualitas tinggi, SPI yang meningkat, serta pengungkapan yang lebih lengkap. Upaya yang dapat digunakan untuk menurunkan informasi asimetri yaitu dengan memberi isyarat baik ke masyarakat, misalnya berupa informasi keuangan terpercaya. Internet merupakan media paling efektif guna menunjukkan sinyal. Pemerintah berupaya menyampaikan laporan keuangan pada situs web secara optimal guna memperlihatkan bahwa pemerintah mengelola sumber daya sesuai amanat dari rakyat (Puspita & Martani, 2012).

2.1.3. Korupsi

Terminologi korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*, dengan asal kata *corrumpere* yang merupakan istilah bahasa Latin yang lebih tua. Korupsi muncul pada beberapa bahasa di Eropa, misalnya bahasa Inggris yakni *corruption* dan *corrupt*, bahasa Perancis yaitu kata *corruption*, serta bahasa Belanda yaitu *corruptie*, lalu menjadi korupsi pada bahasa Indonesia. *Black's Law Dictionary* menyatakan korupsi adalah aktivitas bertujuan memberi keuntungan yang bertentangan dengan tugas serta hak orang lain. Korupsi merupakan hal yang dilakukan pejabat/pemegang kepercayaan serta bertentangan dengan aturan guna mendapat keuntungan pribadi. *The Australian Legal Dictionary* menyatakan korupsi merupakan hal yang bertentangan dengan tanggung jawab publik guna mendapat kompensasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan korupsi merupakan penyelewengan/penggelapan (uang negara/perusahaan) bagi kepentingan pribadi atau orang lain (Jahja, 2012).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan pembangunan nasional memiliki tujuan menciptakan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, serta tertib. Usaha pencegahan dan pemberantasan tipikor perlu secara terus menerus ditingkatkan guna mewujudkan tujuan tersebut. Peraturan ini dimaksudkan mampu memenuhi kebutuhan hukum dalam mencegah dan memberantas tiap bentuk tipikor yang merugikan perekonomian atau keuangan negara. Ekonomi negara merupakan iklim perekonomian yang dirancang sebagai upaya bersama sesuai dengan

kebijakan pemerintah, serta bertujuan memberi manfaat, kemakmuran serta kesejahteraan bagi rakyat.

Keuangan negara adalah kekayaan dalam bentuk apapun, termasuk bagian kekayaan negara, serta hak dan kewajiban karena ada dalam:

1. Penguasaan, pengurusan, serta pertanggungjawaban pejabat lembaga negara/daerah.
2. Penguasaan, pengurusan, serta pertanggungjawaban badan usaha milik negara/daerah dan perusahaan yang menyertakan modal negara.

Peraturan tersebut menjelaskan dengan detail kegiatan yang dapat dikenakan sanksi pidana terkait korupsi. Pada dasarnya perbuatan tersebut dikategorikan menjadi kerugian keuangan, suap, penggelapan, pemerasan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dengan melawan aturan guna mendapat keuntungan maupun manfaat pribadi atau kelompok tertentu, serta merugikan kepentingan umum (Undang-undang Nomor 20, Tahun 2001).

Terlaksananya korupsi di suatu lembaga memiliki pola tertentu, yaitu:

1. *Mercenary of power* yaitu penggunaan wewenang yang tidak tepat melalui metode suap, pengurangan standar spesifikasi atau volume pekerjaan, serta penggelembungan penggunaan anggaran. Pelaku hal ini adalah pejabat yang memiliki kedudukan belum terlalu tinggi serta tidak berkaitan dengan aktivitas politik.
2. *Discretionary abuse of power* yaitu penyelewengan ini dilakukan oleh pihak dalam pemerintahan yang memiliki kewenangan tinggi, seperti kepala daerah, melalui penetapan aturan yang bias sehingga memberi kemudahan bagi pihak yang dituju.
3. *Ideological abuse of power* yaitu hal ini dilakukan pejabat untuk tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya. Hal ini dapat terjadi dengan adanya dukungan kelompok pada pihak tertentu demi mencapai jabatan strategis pada birokrasi atau lembaga eksekutif. Selanjutnya, pada waktu yang akan datang mereka mendapat kompensasi atas tindakan tersebut (Utomo *et al.*, 2018).

Korupsi merupakan bentuk kecurangan/*fraud*, yang dapat diartikan sebagai kecurangan berupa penipuan, pencurian harta organisasi, rekening fiktif, serta tindakan penyelewengan lainnya. *Fraud* dapat menguntungkan individu atau kelompok, baik secara langsung (berupa uang atau barang) ataupun secara tidak langsung (berupa promosi dan lainnya). Korupsi merupakan salah satu kecurangan yang tidak mudah untuk ditelusuri. Hal ini disebabkan korupsi berkaitan dengan kerja sama beberapa pihak, dan merupakan kecurangan yang sering ditemukan pada negara yang masih berkembang disebabkan penegakan hukum belum kuat serta kesadaran akan tata kelola pemerintahan belum cukup baik. Korupsi berkaitan dengan wewenang yang digunakan dengan tidak seharusnya, konflik kepentingan, tindakan suap, penerimaan tidak sesuai aturan, serta pemerasan. Akuntansi merupakan proses pencatatan, klasifikasi, meringkas, dan memberi data hasil aktivitas suatu entitas serta kegiatan terkait keuangan agar bermanfaat dalam keputusan yang diambil oleh pihak berkepentingan. Informasi dari akuntansi digunakan dalam penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan sistem ini merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi (Umar, 2011).

2.1.4. Transparansi

Transparansi merupakan asas terkait jaminan kebebasan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pengelolaan pemerintahan, yaitu informasi mengenai kebijakan pemerintah, mulai dari awal pembuatan dan pelaksanaannya, sampai dengan capaian hasilnya. Transparansi berkaitan dengan 2 aspek, yakni komunikasi publik yang dilakukan oleh pihak dalam pemerintahan serta hak dari masyarakat untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. Dua hal ini sukar dilaksanakan apabila pemerintah tidak memiliki kinerja yang baik. Manajemen yang baik terkait kinerja merupakan awal pelaksanaan transparansi. Pemerintah perlu membuka informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Pemerintah mempunyai data berskala besar, sehingga petugas informasi profesional diperlukan dalam penyebarluasan keputusan penting ke rakyat dan untuk menjelaskan alasan keputusan tersebut (Krina, 2003).

Transparansi dapat diartikan jelas serta dapat dilihat dengan menyeluruh. Keadilan dapat ditumbuhkan dengan pelaksanaan transparansi atas kebijakan di lingkungan organisasi. Pemerintah dinyatakan bertanggung jawab apabila dapat menepati janjinya. Salah satu cara pertanggungjawaban ini ialah dengan prinsip transparansi. Prinsip ini memberi kesempatan bagi warga guna mengetahui kebijakan yang akan dan telah dipilih oleh pemerintah. Transparansi di pengelolaan pemerintah daerah dimaknai sebagai 2 hal, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah ke masyarakat, serta sebagai usaha untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan menurunkan kesempatan praktik korupsi (Tahir, 2014).

Media berperan penting pada proses transparansi karena merupakan wadah dalam komunikasi publik, dapat digunakan untuk penjelasan berbagai informasi publik yang relevan, serta dapat digunakan sebagai pengawas atas aksi yang dilakukan pemerintah dan jika terdapat penyimpangan oleh aparat. Transparansi memunculkan konsekuensi yaitu adanya kontrol berlebih dari masyarakat serta media massa. Kewajiban keterbukaan harusimbang dengan kriteria mengenai tipe informasi yang dapat diberikan serta kepada siapa informasi tersebut disampaikan. Keberadaan penerapan prinsip transparansi dapat diketahui dari tersedianya:

1. Tata cara terkait keterbukaan serta standardisasi pada tiap aktivitas layanan publik.
2. Tata cara terkait penyampaian pertanyaan dari publik mengenai keputusan pelayanan publik.
3. Tata cara terkait pelaporan serta penyebaran informasi berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan pihak di dalam pemerintah (Krina, 2003).

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan transparansi merupakan keterbukaan pelaksanaan atas keputusan yang dipilih, serta keterbukaan dalam pemerintah menyampaikan informasi yang relevan ke publik. Mekanisme serta pelaksanaan keterbukaan informasi dapat menciptakan pemerintahan dengan tata kelola baik. Keterbukaan informasi yang dinyatakan dalam peraturan ini antara lain:

1. Pasal 2 menyatakan informasi publik memiliki sifat terbuka dan penggunaanya dapat mengakses, serta bisa didapatkan setiap pemohon informasi melalui cara yang mudah.

2. Pasal 9 menyatakan pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan dan kinerja badan publik serta laporan keuangan. Penyebarluasan informasi tersebut dilakukan dengan cara sederhana serta dalam bahasa yang dapat dipahami (Undang-undang Nomor 14, Tahun 2008).

Transparansi dapat menjamin bahwa aktivitas oleh pemerintah menjadi terbuka serta jelas, dan bisa diketahui masyarakat. Pelaksanaan transparansi diharapkan dapat menjadi tambahan pengawasan sehingga jika terdapat kekeliruan maka dapat diperbaiki dengan cepat sebelum terjadi kegagalan atas seluruh aktivitas pemerintah (Duadji, 2012). Dalam menciptakan pengelolaan sumber daya yang baik serta bersih dari penyelewengan, maka penyelenggaraannya wajib sesuai dengan prinsip keterbukaan. Prinsip ini merupakan prinsip membuka diri atas hak publik dalam mendapatkan informasi yang benar terkait pengelolaan pemerintah, dengan memperhatikan hak asasi baik pribadi, kelompok maupun hak atas rahasia pemerintah. Transparansi adalah tersedianya kebijakan anggaran, informasi anggaran yang bisa diakses dengan cara sederhana, laporan pertanggungjawaban, wadah untuk suara rakyat, memiliki sistem mengenai pemberian informasi publik, serta terdapat informasi lain yang dipublikasikan berkaitan dengan kegiatan signifikan lain, misalnya informasi mengenai pengadaan barang (Khairudin & Erlanda, 2016).

Keterbukaan informasi atau transparansi oleh badan publik melalui situs web terdiri dari:

1. Informasi wajib tersedia serta pengumumannya dilakukan secara berkala berupa:
 - a. Informasi dari badan publik (alamat/kedudukan, struktur organisasi, LHKPN)
 - b. Informasi mengenai program berjalan (nama program, pelaksana, target, jadwal, anggaran)
 - c. Informasi tentang kinerja atas realisasi kegiatan
 - d. Informasi laporan keuangan sekurang-kurangnya berupa LRA, Neraca, LAK dan CALK
 - e. Ringkasan akses informasi publik

- f. Informasi mengenai mekanisme pengaduan dugaan penyelewengan wewenang oleh pejabat di pemerintah
2. Informasi wajib diumumkan secara serta merta berupa:
 - a. Informasi mengenai bencana alam serta non alam
 - b. Informasi tentang bencana sosial
 - c. Informasi tentang penyebaran penyakit menular/berpotensi menular
 3. Informasi wajib tersedia tiap saat berupa:
 - a. Informasi mengenai peraturan serta keputusan yang ditetapkan badan publik
 - b. Informasi tentang pedoman organisasi dan administrasi
 - c. Informasi tentang syarat-syarat perizinan berikut dokumen pendukungnya (Peraturan Komisi Informasi Nomor 1, Tahun 2010).

2.1.5. Hasil Audit

Undang-undang Dasar 1945 menyatakan BPK melakukan pemeriksaan secara bebas dan mandiri atas penyelenggaraan serta pertanggungjawaban keuangan yang dikelola pemerintah. Pemeriksaan yang dilakukan berupa audit keuangan, kinerja serta dengan tujuan tertentu. Audit keuangan memiliki tujuan memberi opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Terdapat 4 jenis opini yang dapat diberikan auditor yaitu *WTP/unqualified opinion*, *WDP/qualified opinion*, *TW/adverse opinion*, atau *TMP/disclaimer opinion*. Opini WTP dikeluarkan apabila laporan keuangan memiliki penyajian tanpa kesalahan bernilai material. Opini WDP diterbitkan apabila sebagian besar informasi tersaji pada laporan keuangan tidak memiliki kesalahan material, dikecualikan pada akun tertentu yang merupakan pengecualian. Opini TW diberikan apabila terdapat salah saji material pada penyusunan laporan keuangan, serta penyajian laporannya tidak sesuai keadaan sebenarnya. TMP merupakan kondisi saat pemeriksa menolak memberi pendapat disebabkan pemeriksa tidak dapat yakin atas kewajaran penyajian laporan yang disampaikan oleh *auditee*.

LHP atas LKPD, selain memuat opini dan laporan keuangan *audited*, juga memuat temuan audit dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh *auditee*. IHPS

yang diterbitkan BPK menunjukkan temuan pemeriksaan dapat berupa kekurangan sistem pengendalian serta pelanggaran terhadap aturan yaitu:

1. Kekurangan SPI terkait akuntansi serta proses laporannya (contoh: pencatatan transaksi tidak tepat, laporan yang disusun belum sesuai standar, sistem terkait informasi akuntansi serta terkait proses laporannya tidak memiliki sumber daya yang cukup), terkait pengelolaan anggaran pendapatan serta belanja (contoh: perencanaan kegiatan kurang memadai, aktivitas belanja terjadi tidak sesuai tata cara, serta kebijakan yang ditetapkan belum tepat), serta terkait kelemahan pengendalian intern (contoh: belum ada standar operasional prosedur/SOP, SOP belum berjalan optimal, belum ada pengawasan intern, satuan pengawasan intern belum memadai, belum terdapat pemisahan tugas).
2. Ketidapatuhan terhadap peraturan terkait potensi kerugian daerah (contoh: belanja fiktif, rekanan pengadaan belum menyelesaikan pekerjaan, kelebihan pembayaran, biaya melebihi standar, belanja tidak sesuai ketentuan, aset dikuasai pihak lain), terkait kekurangan penerimaan (contoh: penggunaan langsung pendapatan retribusi, sisa uang tidak disetor ke kas daerah), serta terkait penyimpangan administrasi (contoh: pertanggungjawaban tidak akuntabel, kepemilikan aset belum didukung bukti sah).

Unsur temuan audit ialah kondisi, kriteria, sebab, akibat serta rekomendasi. Kondisi merupakan hal faktual serta obyektif yang oleh auditor dibandingkan dengan kondisi seharusnya dan dengan kriteria. Sebab adalah akar dari permasalahan terjadinya perbedaan antara kondisi dengan kriteria. Akibat adalah konsekuensi akibat adanya perbedaan tersebut. Rekomendasi merupakan usaha memperbaiki kondisi yang dapat dilakukan antara lain dengan menghilangkan penyebab terjadinya kondisi.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan *auditee* wajib memberi respon terhadap hasil laporan. Tahapan berikutnya ialah pemantauan TLRHP. Tahapan ini penting untuk dilakukan guna mengetahui apakah rekomendasi yang diberikan telah dilaksanakan *auditee*. Liu serta Lin berpendapat bahwa usaha pelaksanaan rekomendasi audit lebih penting daripada proses penelusuran atas temuan pemeriksaan karena merupakan usaha memperbaiki masalah. Pelaksanaan

rekomendasi merupakan wujud tanggung jawab *auditee* berkaitan dengan kekurangannya pada proses pertanggungjawaban keuangan. Tanpa pelaksanaan rekomendasi maka temuan pemeriksaan tidak akan memiliki manfaat (Liu & Lin, 2012).

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan pejabat yang entitasnya diperiksa wajib melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan jawaban atas pelaksanaan rekomendasi serta dibuktikan melalui dokumen pendukung yang dilampirkan. TLRHP ini dilaporkan ke BPK tidak lebih dari 2 bulan setelah tanggal LHP diserahkan dari auditor ke *auditee*. Aparat pengawas intern melakukan verifikasi terlebih dahulu atas jawaban serta bukti pendukungnya sebelum diserahkan ke BPK. Jika rekomendasi pemeriksaan tidak dapat terlaksana maka *auditee* wajib menyampaikan alasan yang sah, meliputi keadaan kahar, sakit dibuktikan melalui surat dokter, memiliki status tersangka serta ditahan, atau alasan lain yang dianggap sah.

BPK melakukan analisa atas penjelasan dari *auditee* guna penentuan apakah rekomendasi telah dilaksanakan dengan tepat, kemudian hasil penelaahannya akan diklasifikasi ke kategori TLRHP sebagai berikut:

1. Tindak lanjut dilaksanakan tepat dengan rekomendasi (status 1): jika rekomendasi telah dilaksanakan dengan memadai oleh *auditee*.
2. Tindak lanjut dilaksanakan namun belum tepat dengan rekomendasi (status 2): jika pelaksanaan rekomendasi masih berjalan.
3. Rekomendasi pemeriksaan belum ditindaklanjuti (status 3): jika *auditee* belum melaksanakan rekomendasi.
4. Rekomendasi pemeriksaan tidak dapat ditindaklanjuti (status 4): rekomendasi dari auditor tidak dapat dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari BPK (Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2, Tahun 2017).

IHPS Semester 2 Tahun 2020 menunjukkan status tindak lanjut rekomendasi pada LHP Tahun 2005 - 2020 berupa status 1 sejumlah 75,6%, status 2 sejumlah 17,6%, status 3 sejumlah 5,8% serta status 4 sejumlah 1%.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya terkait transparansi dan hasil audit serta korupsi yang menjadi acuan dalam penelitian ini tersaji di Tabel 1.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Artikel (Penulis/ Judul/ Jurnal/ Tahun)	Variabel	Hasil
1	A. D. Kurniawati, Y. M. Pratama/ <i>The role of government auditing in controlling the level of corruption in Indonesia</i> / Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia [S2]/ 2021	Temuan audit, opini audit, TLRHP, tingkat potensi korupsi	Temuan dan TLRHP berpengaruh positif terhadap potensi korupsi. Opini audit belum berpengaruh pada korupsi.
2	A. N. Ikhwan, B. Subroto, A. Ghofar/ <i>The influence of accountability on clean-corruption perception in local government</i> / Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan [S2]/ 2016	Opini audit, aplikasi sistem akuntabilitas, hasil evaluasi kinerja, indeks integritas sektor publik	Opini audit dan hasil evaluasi kinerja berpengaruh positif terhadap indeks integritas sektor publik. Aplikasi sistem akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap indeks integritas sektor publik.
3	C. Chen, M. I. Neshkova/ <i>The effect of fiscal transparency on corruption: a panel cross-country analysis</i> / <i>Public Administration</i> [Q1]/ 2020	Transparansi fiskal, laporan audit, laporan akhir tahun, CPI	Peningkatan transparansi fiskal menurunkan tingkat korupsi. Laporan audit dan laporan akhir tahun berefek negatif kuat terhadap tingkat korupsi.
4	D. P. A. Rahayuningtyas, D. Setyaningrum/ Pengaruh tata kelola dan <i>e-government</i> terhadap korupsi/ <i>Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan</i> [S2]/ 2017	TLRHP, <i>fairness</i> , desentralisasi fiskal, transparansi, profesionalisme, <i>responsiveness</i> , penggunaan <i>e-government</i> , korupsi	TLRHP, profesionalisme serta <i>e-government</i> memiliki dampak negatif untuk menurunkan probabilitas korupsi. Desentralisasi meningkatkan probabilitas korupsi. <i>Fairness</i> , transparansi serta <i>responsiveness</i> belum berdampak terhadap tingkat korupsi.
5	H. T. Gedeona/ Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Sebuah Alternatif Pemberantasan Korupsi di Tingkat Daerah/ <i>Jurnal Ilmu Administrasi</i> [S3]/ 2005	Transparansi, korupsi	Tata cara pengelolaan yang terbuka dapat menurunkan praktik korupsi anggaran daerah di pihak eksekutif dan legislatif.
6	I. Brusca, F. M. Rossi, N. Aversano/ <i>Accountability and transparency to fight against corruption: an international comparative analysis</i> / <i>Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice</i> [Q2]/ 2017	Transparansi, kualitas sistem, peran BPK, persepsi korupsi	Transparansi, kualitas sistem dan peran BPK berpengaruh positif pada tingkat korupsi, dengan maksud mengarah ke yang lebih baik.

No.	Artikel (Penulis/ Judul/ Jurnal/ Tahun)	Variabel	Hasil
7	J. Liu, B. Lin/ <i>Government auditing and corruption control: evidence from China's provincial panel data/ China Journal of Accounting Research [Q2]/ 2012</i>	Temuan pemeriksaan, TLRHP, jumlah korupsi	Temuan audit dan korupsi berhubungan positif. TLRHP berhubungan negatif dengan tingkat korupsi.
8	Khairudin, R. Erlanda/ Pengaruh transparansi dan akuntabilitas LKPD terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah (studi pada pemerintah kota se-Sumatera)/ Jurnal Akuntansi & Keuangan [S5]/ 2016	Transparansi, akuntabilitas diukur dengan opini audit, tingkat korupsi	Transparansi mempengaruhi korupsi secara negatif. Opini audit mempengaruhi korupsi secara positif.
9	L. Peisakhin, P. Pinto/ <i>Is transparency an effective anti-corruption strategy? Evidence from a field experiment in India/ Regulation & Governance [Q1]/ 2010</i>	Transparansi, aturan kebebasan informasi, korupsi	Transparansi dan suara yang lebih besar menurunkan korupsi.
10	L. Pramesti, Haryanto/ Akuntabilitas dan tingkat korupsi pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah/ Jurnal Akuntansi Aktual [S3]/ 2019	Temuan audit, opini audit, tingkat korupsi	Temuan audit berpengaruh positif pada korupsi. Opini audit belum berdampak pada tingkat korupsi.
11	M. A. Budiman, F. Amyar/ <i>The effect of audit opinions, implementation of audit recommendations, and findings of state losses on corruption levels within ministries and institutions in the Republic of Indonesia/ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara [S2]/ 2021</i>	Opini audit, TLRHP, temuan kerugian negara, tingkat korupsi	Opini pemeriksaan serta TLRHP tidak memiliki pengaruh pada korupsi. Temuan kerugian negara berdampak pada korupsi.
12	M. Bauhr, A. Czibik, J. F. Licht, M. Fazekas/ <i>Lights on the shadow of public procurement: transparency as an antidote to corruption/ Governance [Q1]/ 2019</i>	Transparansi proses pengadaan, transparansi ex ante, risiko korupsi	Transparansi proses pengadaan secara keseluruhan menurunkan risiko korupsi.
13	M. V. Halter, M. C. C. Arruda, R. B. Halter/ <i>Transparency to reduce corruption?/ Journal of Business Ethics [Q1]/ 2009</i>	Transparansi, korupsi, citra perusahaan	Transparansi dapat digunakan sebagai alat guna menurunkan korupsi, dengan berkurangnya korupsi maka dapat membangun citra baik perusahaan.

No.	Artikel (Penulis/ Judul/ Jurnal/ Tahun)	Variabel	Hasil
14	R. Tehupuring/ <i>Unqualified opinion and level of corruption: the triangulation approach</i> / Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara [S2]/ 2018	Opini audit, korupsi	WTP tidak mempengaruhi korupsi.
15	Rini, A. Sarah/ Opini audit dan pengungkapan atas LK pemerintah kabupaten serta kaitannya dengan korupsi di Indonesia/ Jurnal Etikonomi [S2]/ 2014	Opini audit, pengungkapan LK, tingkat korupsi	Kualitas LK semakin membaik terbukti dengan peningkatan opini. Pengungkapan LK tidak berkaitan dengan opini audit. Terdapat peningkatan korupsi dalam periode penelitian. Pengungkapan LK serta opini memiliki keterkaitan dengan tingkat korupsi.
16	Rini, L. Damiani/ Analisis hasil audit pemerintahan dan tingkat korupsi pemerintahan provinsi di Indonesia/ Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis [S2]/ 2017	Opini pemeriksaan, temuan, TLRHP, korupsi	Opini serta temuan pemeriksaan belum berdampak pada korupsi. TLRHP berdampak negatif pada korupsi.
17	S. Andersson, P. M. Heywood/ <i>The politics of perception: use and abuse of TI's approach to measuring corruption</i> / <i>Political Studies</i> [Q1]/ 2009	Transparansi korupsi secara global melalui CPI	Transparansi CPI yang dapat diketahui publik terbukti berpengaruh dalam memerangi praktik korupsi karena pemerintah terdorong untuk memperbaiki tata kelolanya.
18	S. M. Isnadiva, Haryanto/ Hasil pemeriksaan dan kasus korupsi pada pemerintah daerah/ Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan [S3]/ 2021	Temuan audit, TLRHP, opini audit, tingkat korupsi	Temuan pemeriksaan dan TLRHP berpengaruh positif pada korupsi. Opini pemeriksaan belum berdampak pada korupsi.
19	S. Triwibowo/ <i>Public financial management and corruption in Indonesia: a panel cointegration and causality analysis</i> / <i>Journal of Indonesian Economy and Business</i> [S2]/ 2019	Opini audit, CPI	Dalam jangka panjang, opini audit dapat mendorong pemerintahan yang lebih bersih.
20	T. Bararoh, B. Prayitno/ Analisis faktor transparansi pemerintah dan tingkat pendidikan masyarakat yang mempengaruhi korupsi di kabupaten dan kotamadya di Indonesia/ <i>Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi</i> [S4]/ 2011	Transparansi pemerintah, pendidikan masyarakat, korupsi	Transparansi memiliki pengaruh terhadap korupsi. Pendidikan masyarakat terbukti tidak berpengaruh terhadap korupsi.

No.	Artikel (Penulis/ Judul/ Jurnal/ Tahun)	Variabel	Hasil
21	W. Aminah/ Pengaruh akuntabilitas, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi/ <i>Journal Accounting and Finance</i> [S5]/ 2020	Akuntabilitas dengan pengukuran opini, temuan pemeriksaan, TLRHP, korupsi	Opini, temuan pemeriksaan, TLRHP secara bersama memiliki dampak pada tingkat korupsi. Secara masing-masing, TLRHP memiliki dampak negatif pada korupsi. Opini dan temuan pemeriksaan tidak memiliki pengaruh.
22	Warkini, I. R. Bawono, Y. E. Restianto/ Akuntabilitas dan transparansi LKPD berpengaruh terhadap kasus korupsi: benarkah?/ <i>Akuntansi Dewantara</i> [S4]/ 2020	Opini audit, SPI, transparansi, kasus korupsi	Opini pemeriksaan, SPI serta transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap kasus korupsi.
23	Y. Effendy/ Tinjauan hubungan opini WTP BPK dengan kasus korupsi pada pemda di Indonesia kajian manajemen keuangan pemerintah, hubungan antara masyarakat, pemerintah dan pemeriksa (auditor)/ <i>Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis</i> [S3]/ 2013	Opini WTP, kasus korupsi	Opini audit belum dapat menjamin pengelolaan keuangan yang baik dan minim korupsi.

2.3. Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini menguji 4 hipotesis sebagai berikut:

2.3.1. Pengaruh Transparansi terhadap Tingkat Korupsi

Transparansi pengelolaan anggaran merupakan hal penting guna mencegah atau menghapus praktik penyelewengan anggaran daerah. Prinsip transparansi dapat berupa transparansi atas legalitas dari sumber anggaran, mekanisme dalam penggunaannya, alokasi serta pertanggungjawaban yang memberi kesempatan pengawasan oleh seluruh rakyat (Gedeona, 2005). Informasi berupa CPI dari organisasi TI telah berkontribusi terhadap pengembangan pendekatan untuk memerangi korupsi melalui promosi pemerintahan yang baik (Andersson & Heywood, 2009).

Transparansi harus dipandang sebagai alat signifikan untuk mendorong profesionalisme dalam kinerja dan dalam pelaporan data, serta dapat digunakan sebagai alat guna menurunkan korupsi (Halter *et al.*, 2009). Transparansi yang lebih

besar dapat menurunkan korupsi, bahkan di negara dengan masyarakat sangat hierarkis dan majemuk (Peisakhin & Pinto, 2010). Transparansi pada proses tender dapat menurunkan risiko korupsi secara substansial (Bauhr *et al.*, 2019). Teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah memberikan nilai yang lebih tinggi terkait efektivitas, efisiensi, keterbukaan, serta proses tanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan. Pemanfaatan dapat dilakukan dengan mengungkap informasi di situs web. Pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipengaruhi beberapa faktor seperti rasio pendapatan, tipe, serta usia pemerintah. Transparansi pemerintah terwujud pada laporan keuangan serta laporan terkait kinerja yang secara rutin diterbitkan (Rikafitri *et al.*, 2017).

Penyebab korupsi di kelembagaan umumnya muncul dari kurangnya transparansi. Kurangnya informasi publik dan transparansi memungkinkan pejabat publik untuk menyamarkan/menyembunyikan korupsi. Kurangnya transparansi di pemerintah menghasilkan opini publik bahwa sedang terdapat kesalahan pengelolaan sumber daya. Cara mencapai tujuan program antikorupsi yang marak diadakan di berbagai negara demokrasi ialah memaksimalkan transparansi kegiatan pemerintah (De Asis, 2006).

Penelitian terhadap 95 negara pada Tahun 2006 – 2014 menunjukkan transparansi fiskal sangat krusial pada tahap akhir tahun anggaran karena mencerminkan pengeluaran pemerintah yang sebenarnya dan dapat menjadi alat antikorupsi yang kuat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan transparansi anggaran oleh pemerintah bisa membatasi celah penyelewengan oleh pejabat yang tidak jujur, sehingga menurunkan tindak terlarang seperti korupsi (Chen & Neshkova, 2020). Penelitian atas pemerintah daerah di Indonesia menggunakan data Tahun 2010 menunjukkan transparansi keuangan pemerintah memiliki pengaruh terhadap korupsi yang dilakukan pengelola badan publik di pemerintah kabupaten dan kota (Bararoh & Prayitno, 2011).

H1: transparansi berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi.

2.3.2. Pengaruh Hasil Audit terhadap Tingkat Korupsi

a. Pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat Korupsi

Laporan keuangan sektor publik ialah komponen signifikan karena sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pengelolaan APBD (Mardiasmo, 2009). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan mengacu kepada SAP serta diperiksa oleh BPK guna mengetahui apakah laporan telah disusun sesuai standar dan tidak melanggar peraturan berlaku. Pemeriksaan laporan keuangan menjadi dasar pemberian opini atas kewajaran informasi tersaji berdasarkan kriteria kesesuaian pada regulasi, pengungkapan yang cukup, serta efektivitas SPI (Khairudin & Erlanda, 2016). Tanpa adanya pemeriksaan laporan keuangan maka pejabat pemerintah lebih memiliki kesempatan terlibat dalam korupsi (De Asis, 2006).

Studi dengan periode penelitian Tahun 2006 – 2017 menunjukkan bukti empiris bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara kualitas manajemen keuangan publik, yang tercermin dari opini pemeriksaan, dengan korupsi pada suatu daerah (Triwibowo, 2019). Hasil penelitian tersebut menyatakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan perlu ditingkatkan guna membantu mencegah kesalahan dalam pengelolaannya. Penelitian atas data pemerintah daerah Tahun 2012 dan 2013 menunjukkan opini pemeriksaan memiliki pengaruh terhadap persepsi bersih korupsi (Ikhwan *et al.*, 2016). Penelitian terhadap LKPD serta data korupsi Tahun 2011 juga menunjukkan opini audit memiliki keterkaitan dengan tingkat korupsi (Rini & Sarah, 2014).

H2: opini audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi.

b. Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Korupsi

Fungsi penting dari pemeriksaan sektor publik antara lain untuk menentukan apakah proses pengumpulan dan pembelanjaan sumber daya publik serta transaksi terkait lainnya sesuai dengan peraturan, untuk menentukan apakah terdapat penyimpangan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja publik serta untuk mengungkapkan penyimpangan tersebut dalam laporan audit. Jumlah penyimpangan yang ditemukan dalam audit pemerintah mencerminkan bagaimana sumber daya publik disalahgunakan oleh instansi yang mengelolanya (Liu & Lin, 2012). Pengungkapan temuan berupa pelanggaran aturan serta hukuman yang

diberikan mampu menurunkan tingkat korupsi dalam suatu organisasi. Hal lain yang diperhatikan dalam audit ialah SPI, yang dapat memberi gambaran bahwa organisasi dengan SPI kuat akan memiliki tindakan kecurangan yang ringan. Cara yang dapat ditempuh untuk mencegah terjadinya kecurangan ialah dengan menguatkan SPI (Huefner, 2011). Semakin banyak temuan kekurangan SPI dan temuan pelanggaran terhadap peraturan dapat meningkatkan terjadinya korupsi, dan sebaliknya jika temuan pada laporan audit berjumlah kecil maka dapat mengindikasikan korupsi yang terjadi lebih kecil (Aminah, 2020).

Penelitian atas data provinsi di China pada Tahun 2012 menunjukkan jumlah ketidakteraturan yang terdeteksi selama audit berhubungan positif dengan tingkat korupsi (Liu & Lin, 2012). Penelitian atas data Provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan temuan pemeriksaan berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Temuan pemeriksaan pada penelitian tersebut diproksikan dengan jumlah temuan, dan hasilnya menunjukkan temuan pemeriksaan memiliki pengaruh positif terhadap korupsi (Pramesti & Haryanto, 2019). Penelitian tentang hubungan hasil audit dengan kasus korupsi menyatakan banyaknya kasus temuan menjadi indikasi tingginya kasus keuangan di pemerintah, khususnya pemerintah daerah (Effendy, 2013). Penelitian dengan data Tahun 2014 – 2017 memiliki hasil yaitu temuan kerugian negara memiliki pengaruh terhadap korupsi (Budiman & Amyar, 2021). Selanjutnya, penelitian dengan periode Tahun 2017 dan 2018 di Provinsi Jawa Barat menunjukkan temuan pemeriksaan memiliki pengaruh terhadap korupsi (Aminah, 2020). Penelitian yang juga menunjukkan hasil yang selaras dilakukan pada data Tahun 2015 – 2018 bahwa temuan audit berpengaruh positif pada korupsi (Isnadiva & Haryanto, 2021). Penelitian menggunakan data Tahun 2015 – 2019 menyatakan temuan pemeriksaan berpengaruh positif pada korupsi, dengan pengukuran berupa tingkat pengaduan masyarakat terkait korupsi yang diterima di KPK (Kurniawati & Pratama, 2021).

H3: temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi.

c. Pengaruh TLRHP terhadap Tingkat Korupsi

Fungsi lembaga audit pemerintah tidak terbatas pada pengungkapan pendeteksian masalah, tetapi termasuk saran perbaikan/rekomendasi audit atas

penyimpangan/tindak ilegal yang ditemui. Temuan audit tidak memberi manfaat jika rekomendasinya tidak ditindaklanjuti (Isnadiva & Haryanto, 2021). TLRHP merupakan tahapan penting serta wajib dilakukan oleh *auditee*. TLRHP adalah salah satu cara perbaikan dari kesalahan yang ditemukan pada proses pengelolaan sumber daya publik yang menjadi kewenangannya. Rekomendasi audit yang berupa penerapan sanksi memberikan efek jera terhadap pihak yang diaudit (Umar, 2012). Hasil pelaksanaan rekomendasi audit menunjukkan peningkatan upaya perbaikan pada saat ini akan menghasilkan lebih sedikit korupsi (Liu & Lin, 2012). Upaya perbaikan setelah proses pemeriksaan adalah langkah penting karena merupakan upaya yang dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan, serta sebagai bentuk antisipasi kesalahan yang sama di masa mendatang. Peningkatan TLRHP menunjukkan peningkatan keinginan pemerintah guna perbaikan penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara/daerah sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang minim penyelewengan (Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2017).

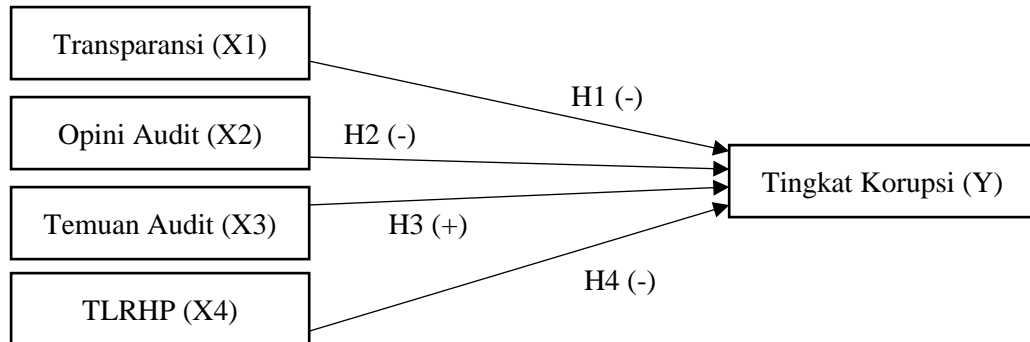
Upaya perbaikan setelah proses pemeriksaan memiliki hubungan negatif dengan korupsi di provinsi. Hasil empiris menunjukkan besarnya upaya perbaikan berupa pelaksanaan rekomendasi audit dapat membantu menurunkan tingkat korupsi secara lebih efektif (Liu & Lin, 2012). Penelitian pada pemerintah provinsi di Indonesia juga menunjukkan upaya pemenuhan rekomendasi audit memiliki pengaruh negatif pada korupsi. Hasil penelitian menyatakan tingginya TLRHP oleh *auditee*, yaitu organisasi publik, maka mencerminkan tingkat korupsi yang rendah. Atas hasil tersebut, *auditee* diharapkan dapat melaksanakan rekomendasi dengan lebih baik dan auditor dapat meningkatkan pemantauan guna bersama-sama menurunkan tingkat korupsi (Rini & Damiati, 2017). Penelitian dengan data periode Tahun 2017 dan 2018 juga menunjukkan bahwa TLRHP berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi (Aminah, 2020).

H4: TLRHP berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi.

2.4. Model Penelitian

Model penelitian tersaji pada Gambar 4.

Gambar 4. Model Penelitian



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan ialah penelitian bersifat deskriptif kuantitatif. Jenis penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan fenomena empiris dengan penggunaan data statistik, karakteristik, serta hubungan antar variabel.

3.2. Populasi dan Metode Pengambilan Sampel

Populasi merupakan kelompok dengan karakteristik tertentu. Populasi pada penelitian ini yaitu pemerintah provinsi yang ada di Indonesia. Pemilihan populasi ini karena memiliki APBD bernilai besar dibandingkan pemerintah daerah lainnya, serta mengadopsi penelitian oleh Liu dan Lin yang dilakukan Tahun 2012 menggunakan data panel pada pemerintah provinsi di China.

Analisis pada penelitian ini menggunakan data panel, yaitu data penggabungan *cross section*/data dari beberapa unit dengan *time series*/data dari beberapa periode waktu. Data panel yang diuji ialah pemerintah provinsi yang memenuhi kriteria selama periode 8 tahun.

Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel pada penelitian ini ditentukan melalui *purposive sampling method*.

Tabel 2. Sampel Penelitian

Populasi provinsi di Indonesia	34
Provinsi induk dan provinsi pemekaran yang datanya belum dapat dipisahkan (Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat)	(6)
Provinsi yang diteliti	28
Jumlah sampel penelitian	224

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan serta telah diolah sebelumnya oleh pihak lain. Untuk memperoleh informasi relevan dalam proses analisis, maka data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, yakni pengumpulan data yang diperlukan, lalu dilakukan proses pencatatan menggunakan tabulasi, selanjutnya dilakukan pengujian. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Jumlah kasus tipikor pada Laporan Tahunan yang diterbitkan Kejaksaan Agung.
2. Data keuangan dan informasi lainnya yang rilis di situs web masing-masing pemerintah provinsi.
3. Opini audit, jumlah temuan audit dan TLRHP pada IHPS yang diterbitkan BPK.

3.4. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan obyek pusat perhatian dari suatu penelitian. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel terikat, yakni tingkat korupsi, serta variabel bebas, terdiri dari transparansi, opini audit, temuan audit, dan TLRHP. Definisi operasional merupakan pengertian yang diberikan terhadap variabel melalui proses penentuan spesifikasi kegiatan yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur tiap variabel. Definisi operasional serta pengukuran variabel di penelitian ini adalah:

3.4.1. Tingkat korupsi

Tipikor merupakan suatu perbuatan melanggar hukum untuk menguntungkan dan/atau memperkaya diri melalui penyalahgunaan wewenang, serta merugikan masyarakat dan negara. Sesuai dengan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025, maka Kejaksaan Agung telah melaksanakan kegiatan penindakan dalam rangka pemberantasan tipikor. Pemberantasan tipikor dapat mempidanakan pelaku serta memulihkan kerugian keuangan negara. Tingkat korupsi pada penelitian ini menggunakan jumlah kasus korupsi tahap penuntutan berdasarkan Rekapitulasi Penanganan

Perkara Tipikor Tahap Penuntutan pada Laporan Tahunan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung (Rini & Damiati, 2017; Tehupuring, 2018).

3.4.2. Transparansi

Kriteria transparansi dalam suatu anggaran pemerintah dapat berupa ketersediaan pengumuman kebijakan anggaran, ketersediaan dokumen anggaran serta kemudahan aksesnya, ketersediaan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu, serta pemberian informasi kepada publik. Kontribusi penelitian ini berupa pengukuran variabel transparansi menggunakan pembobotan ketersediaan data di situs web yang bisa diukur per tahun, dengan mengadopsi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Pasal 11, yaitu:

1. Informasi tentang LHKPN, berupa LHKPN pimpinan daerah.
2. Informasi terkait kegiatan berjalan, berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD.
3. Informasi tentang kinerja pemerintah, berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LKIP.
4. Informasi mengenai laporan keuangan minimal terdiri dari LRA, Neraca, LAK serta CALK.

3.4.3. Opini Audit

Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas apabila laporan bersifat andal, relevan, mudah dipahami serta dapat dibandingkan. Laporan berkualitas menunjukkan kepala daerah bertanggung jawab atas wewenangnya dalam pengelolaan organisasi. Opini audit diberikan atas penyajian laporan keuangan serta kelengkapan dokumen pertanggungjawabannya. Opini pemeriksaan merupakan pernyataan profesional auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan dengan kriteria berupa kesesuaian terhadap SAP, pengungkapan yang cukup, ketaatan pada aturan, serta efektivitas pengendalian intern. Opini pemeriksaan pada penelitian ini diperingkat dengan bobot 4 untuk opini WTP, 3 untuk opini WDP, 2 untuk opini TW, serta 1 untuk TMP berdasarkan data IHPS yang disusun oleh BPK (Aminah, 2020; Khairudin & Erlanda, 2016; Triwibowo, 2019; Warkini *et al.*, 2020).

3.4.4. Temuan Audit

Temuan pemeriksaan merupakan data yang dikumpulkan, diolah serta diuji dalam pelaksanaan pemeriksaan, serta disajikan menurut unsurnya sehingga bermanfaat bagi pihak berkepentingan. Unsur temuan pemeriksaan adalah kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi. Temuan yang diungkap dalam LHP juga memuat tanggapan dari *auditee* yang ditandai dengan kalimat “atas permasalahan tersebut”. Tanggapan tersebut diberikan oleh *auditee* kepada tim audit setelah menerima konsep temuan saat masa pemeriksaan akan berakhir. Temuan pada penelitian ini diukur dengan jumlah temuan audit berdasarkan data IHPS yang disusun oleh BPK (Isnadiva & Haryanto, 2021; Pramesti & Haryanto, 2019; Suhardjanto *et al.*, 2020; Warkini *et al.*, 2020).

3.4.5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit

Tindak lanjut rekomendasi merupakan upaya oleh *auditee* guna memenuhi kewajiban perbaikan atas temuan yang dinyatakan dalam LHP. Tindak lanjut rekomendasi pada IHPS menunjukkan status 1 untuk tindak lanjut yang tepat dengan rekomendasi, 2 untuk pelaksanaan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, 3 untuk rekomendasi belum dilaksanakan, dan 4 untuk rekomendasi tidak dapat dilaksanakan. Status 1 menunjukkan upaya terbaik yang dilakukan *auditee* karena permasalahan yang ditemukan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Pengukuran tindak lanjut rekomendasi dalam penelitian ini adalah persentase rekomendasi status 1 dibanding total rekomendasi berdasarkan data IHPS yang disusun oleh BPK (Budiman & Amyar, 2021; Isnadiva & Haryanto, 2021), dengan rumus:

$$\text{TLRHP} = \frac{\text{jumlah rekomendasi dengan status 1}}{\text{total rekomendasi}}$$

3.4.6. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi dari variabel dependen serta variabel independen tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3. Operasionalisasi Variabel

No.	Variabel	Dimensi	Pengukuran	Sumber Data
1	Tingkat korupsi	Korupsi	Jumlah tipikor per tahun pada tahap penuntutan	Laporan Tahunan dari Kejaksaan Agung
2	Transparansi	Keterbukaan informasi	Ketersediaan data tahunan di situs web: Dokumen LHKPN, RKPD, LKIP, LRA, Neraca, LAK, dan CALK Kriteria pengukuran: 1. Skor 0: jika tidak ada dokumen tersedia 2. Skor 1: jika tersedia 1 dokumen 3. Skor 2: jika tersedia 2 dokumen 4. Skor 3: jika tersedia 3 dokumen 5. Skor 4: jika tersedia 4 dokumen 6. Skor 5: jika tersedia 5 dokumen 7. Skor 6: jika tersedia 6 dokumen 8. Skor 7: jika tersedia seluruh dokumen	Situs web masing-masing pemerintah provinsi
3	Hasil audit	Opini audit	Kriteria pengukuran: 1. Skor 1: opini TMP 2. Skor 2: opini TW 3. Skor 3: opini WDP 4. Skor 4: opini WTP	IHPS dari BPK
		Temuan audit	Jumlah temuan audit per tahun	
		TLRHP	$\text{TLRHP} = \frac{\text{jumlah rekomendasi dengan status 1}}{\text{total rekomendasi}}$	

3.5. Teknik Analisis Data

Tahap analisis pada penelitian ini berupa analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi serta uji hipotesis menggunakan Eviews, sebagai berikut:

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini dilakukan guna memberi gambaran data masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu tingkat korupsi, opini audit, temuan audit, dan TLRHP. Statistik deskriptif merupakan penghitungan rata-rata, standar deviasi serta nilai tertinggi dan terendah dari tiap variabel.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Uji ini merupakan analisis untuk mengetahui jika terdapat masalah asumsi klasik pada model regresi. Penelitian ini diuji dengan data panel yang berjumlah 224 sampel. Jika penelitian menggunakan ukuran sampel kecil atau terbatas, misalnya data kurang dari 100, maka asumsi normalitas memainkan peran penting karena dapat membantu untuk mendapatkan distribusi probabilitas yang tepat. Jika penelitian menggunakan sampel besar, maka asumsi normalitas tidak diwajibkan. Asumsi normalitas dapat dipandang tidak terlalu penting untuk penelitian dengan sampel besar berbentuk data panel (Gujarati dan Porter, 2009). Karakteristik data panel adalah data berstruktururut waktu serta antar individu. Data panel mempunyai keunggulan yaitu bersifat kokoh terhadap asumsi normalitas. Data panel diharapkan mampu menyediakan lebih banyak informasi/*high informational content* (Ariefianto, 2012). Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka pengujian asumsi klasik di penelitian ini adalah uji multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

a. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan dengan tujuan mengetahui jika model regresi memiliki korelasi antar variabel independennya. Regresi tergolong baik jika tidak memiliki korelasi diantara variabel bebasnya. Deteksi multikolinearitas menggunakan *centered VIF*. Apabila *centered VIF* lebih kecil dari 10, maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Namun, apabila *centered VIF* lebih besar dari 10, maka dapat diketahui terjadi multikolinearitas.

b. Uji autokorelasi

Uji ini bertujuan mengetahui jika dalam suatu model regresi mengandung autokorelasi/pengaruh data pada pengamatan sebelumnya dalam model regresi. Autokorelasi disebabkan observasi dilakukan berurutan sepanjang waktu berkaitan satu dengan lainnya. Deteksi autokorelasi pada penelitian ini menggunakan Uji Langrange *Multiplier/LM*, yaitu membandingkan probabilitas *Obs*R-squared* dengan tingkat α senilai 5%.

Kriteria pengujiannya adalah:

1. Data tidak memiliki masalah autokorelasi apabila probabilitas *Obs*R-squared* lebih besar dari 5%.
2. Data memiliki masalah autokorelasi apabila probabilitas *Obs*R-squared* lebih kecil dari 5%.

c. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan mengetahui jika model regresi mempunyai ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya bersifat tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan apabila berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi dikatakan baik jika model tanpa gejala heteroskedastisitas atau mempunyai varians homogen. Heteroskedastisitas disebabkan residual dan nilai prediksi mempunyai pola hubungan. Deteksi heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan hasil Uji ARCH. Data bersifat homoskedastisitas atau tidak memiliki masalah heteroskedastisitas apabila nilai *Prob. Chi-Square* pada *Obs*R-squared* lebih besar dari 5%. Sebaliknya, data bermasalah heteroskedastisitas apabila nilai *Prob. Chi-Square* pada *Obs*R-squared* lebih kecil dari 5%.

3.5.3. Analisis Regresi Data Panel

Data panel adalah gabungan data berupa *time series* serta *cross section*. Data berupa *time series* dalam penelitian ini adalah kurun waktu 8 tahun (Tahun 2013 – 2020), serta data berupa *cross section* adalah data pemerintah provinsi. Analisis regresi merupakan analisis untuk mengetahui hubungan variabel terikat dengan variabel bebas. Analisis regresi linier berganda adalah regresi dengan variabel bebas yang lebih dari satu.

Model yang dapat digunakan dalam estimasi parameter data panel adalah:

a. Model *common effect*

Model *common effect* atau *pooled least square* merupakan teknik paling sederhana dalam estimasi parameter model data panel. Model ini mengkombinasikan data *cross section* serta *time series* sebagai satu kesatuan serta tidak mempertimbangkan adanya perbedaan waktu dan individu. Model ini

mengesampingkan perbedaan dimensi individu maupun waktu. Model ini memandang perilaku data antar individu adalah sama dalam berbagai kurun waktu.

b. Model *fixed effect*

Pendekatan model ini menggunakan asumsi bahwa intersep dari setiap individu adalah berbeda, sedangkan *slope* antar individu adalah tetap/sama. Teknik ini dilakukan dengan variabel *dummy* guna menangkap adanya perbedaan intersep antar individu atau disebut model *least square dummy variable*.

c. Model *random effect*

Model *random effect* mengestimasi data panel dimana variabel gangguan dapat saling berhubungan antar waktu dan antar entitas. Tekniknya adalah dengan menambah variabel gangguan/*error terms* yang dapat muncul di hubungan antar waktu serta antar entitas.

Pemilihan model regresi dilakukan melalui Uji Chow, Uji Hausman dan Uji LM, sebagai berikut:

a. Uji Chow

Chow test atau *likelihood ratio* merupakan uji guna menentukan model *common effect* atau *fixed effect* yang tepat digunakan untuk estimasi data panel. Apabila probabilitas *cross-section Chi-square* di atas 5% maka estimasi data panel menggunakan model *common effect*. Apabila probabilitas *cross-section Chi-square* lebih kecil dari 5% maka estimasi data panel menggunakan model *fixed effect*.

b. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan guna mengetahui model *fixed effect* atau *random effect* yang tepat digunakan untuk estimasi regresi data panel. Jika probabilitas *cross-section random* di atas 5% maka estimasi menggunakan model *random effect*. Apabila probabilitas *cross-section random* di bawah 5% maka estimasi menggunakan model *fixed effect*.

c. Uji LM

Uji ini bertujuan mengetahui model *random effect* atau *common effect* yang tepat untuk estimasi regresi data panel. Apabila probabilitas *cross section* di atas 5% maka estimasi menggunakan model *common effect*. Apabila probabilitas *cross section* lebih kecil dari 5% maka estimasi menggunakan model *random effect* (Ahmaddien & Susanto, 2020).

Model regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:

$$KOR_{it} = \alpha + \beta_1.TRAN_{it} + \beta_2.OPI_{it} + \beta_3.TEMU_{it} + \beta_4.TL_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

KOR : tingkat korupsi

α : konstanta

TRAN : transparansi

OPI : opini audit

TEMU : temuan audit

TL : TLRHP

e : *error term*

i : entitas ke- i

t : periode ke- t

3.5.4. Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan uji hipotesis berupa uji t, uji F serta uji koefisien determinasi.

a. Uji t

Uji t dilakukan guna mengetahui apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan melihat hasil regresi, yaitu membandingkan signifikansi masing-masing variabel bebas dengan tingkat signifikansi 5%. Kriteria dalam uji t yaitu:

1. Jika nilai probabilitas < 5%, maka variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (H_a terdukung, H_0 tidak terdukung).
2. Jika nilai probabilitas > 5%, maka variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (H_a tidak terdukung, H_0 terdukung).

b. Uji F

Uji F dilakukan guna mengetahui apakah semua variabel bebas secara bersama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Tingkat signifikansi dalam penelitian ini ialah 5%. Kriteria penilaian ialah jika $F_{hitung} < 5\%$, maka H_a terdukung dan H_0 tidak terdukung, yang berarti variabel bebas secara bersama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Jika $F_{hitung} > 5\%$, maka H_0 terdukung dan H_a tidak terdukung, yang berarti variabel bebas secara bersama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

c. Uji Koefisien Determinasi

Uji ini dilakukan guna mengetahui besarnya proporsi pengaruh dari variabel bebas (transparansi, opini, temuan audit, dan TLRHP) terhadap variabel terikat yaitu tingkat korupsi. Semakin besar R^2 maka semakin kuat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian menggunakan lebih dari 2 variabel bebas, maka digunakan *adjusted* R^2 sebagai koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi antara 0 – 1. Jika bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan terikat, sedangkan jika bernilai 1 berarti terdapat hubungan kuat/sepurna antara variabel independen dan dependen.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh transparansi dan hasil audit terhadap tingkat korupsi. Transparansi diukur dengan pengungkapan informasi di situs web milik pemerintah provinsi, dan hasil audit diukur dengan opini audit, temuan audit, dan TLRHP. Dari 4 hipotesis yang diuji, terdapat 2 hipotesis yang terdukung. Pengujian hipotesis tersebut menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Penerapan transparansi yang dilakukan pemerintah provinsi memiliki pengaruh dalam menurunkan tingkat korupsi, sehingga hipotesis 1 terdukung. Ketersediaan informasi melalui situs web pemerintah provinsi dapat mencegah terjadinya korupsi oleh pelaksana di pemerintah. Hal ini menunjukkan pelaksanaan transparansi, berupa informasi yang diungkapkan ke publik, akan menurunkan tingkat korupsi di pemerintah provinsi.
2. Opini audit yang baik atas LKPD tidak berpengaruh terhadap pengurangan tingkat korupsi, maka hipotesis 2 tidak terdukung. Opini WTP tidak berdampak terhadap rendahnya korupsi pada suatu pemerintah provinsi. Hal ini terjadi karena opini merupakan pendapat eksternal auditor dalam menilai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah dan tidak dirancang untuk mendeteksi terjadinya korupsi.
3. Jumlah temuan yang dihasilkan selama proses audit mempunyai pengaruh positif terhadap korupsi, sehingga hipotesis 3 terdukung. Temuan audit dapat menjadi indikasi terjadinya korupsi di pemerintah. Hal ini berarti semakin rendah temuan dalam laporan audit akan selaras dengan semakin rendahnya tingkat korupsi pada entitas tersebut.
4. Peningkatan TLRHP atas rekomendasi audit tidak berpengaruh terhadap penurunan tingkat korupsi, maka hipotesis 4 tidak terdukung. Rekomendasi

yang diberikan auditor tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan, namun dapat berkaitan dengan SPI dan kesalahan administrasi. Hal ini menyebabkan tindak lanjut atas rekomendasi tidak berkaitan dengan korupsi yang merupakan penyelewengan penggunaan keuangan daerah.

5.2. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini memberi implikasi bagi pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi. Variabel penelitian yang terbukti mempunyai pengaruh terhadap tingkat korupsi ialah transparansi dan temuan audit. Pemerintah dapat senantiasa melakukan peningkatan transparansi karena bukti empiris menyatakan hal ini berguna untuk membantu pencegahan tipikor di Indonesia. BPK dapat melanjutkan pengembangan program audit serta segera melaksanakannya agar temuan audit yang dihasilkan dapat semakin bermanfaat membantu upaya deteksi tipikor.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini berupa:

1. Penelitian dilakukan atas data pemerintah daerah tingkat provinsi.
2. Penelitian menggunakan data tingkat korupsi dan temuan audit berupa jumlah kasus/temuan.
3. Variabel transparansi diukur atas keterbukaan laporan pertanggungjawaban berupa LRA, Neraca, LAK, dan CALK.
4. Pengukuran variabel temuan audit menggunakan seluruh jumlah temuan yang tersaji pada LHP.

5.4. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya berupa:

1. Penelitian dengan data panel berskala lebih besar, misalnya jangka waktu yang lebih panjang, cakupan pemerintah pusat/daerah yang lebih besar.
2. Penelitian menggunakan data tingkat korupsi dan temuan audit berupa nilai rupiah.

3. Penelitian dengan pengukuran variabel transparansi menggunakan seluruh laporan pertanggungjawaban, yaitu LRA, Neraca, LAK, CALK, LO, LPE dan LPSAL.
4. Penelitian dengan pengukuran variabel temuan audit yang dibedakan antara temuan terkait SPI, administrasi, serta indikasi kerugian keuangan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmaddien, I., & Susanto, B. (2020). *Eviews 9 Analisa Regresi Data Panel*. Ideas Publishing.
- Aminah, W. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 4(2), 94. <https://doi.org/10.25124/jaf.v4i2.3295>
- Andersson, S., & Heywood, P. M. (2009). The politics of perception: Use and abuse of transparency international's approach to measuring corruption. *Political Studies*, 57(4), 746–767. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2008.00758.x>
- Ariefianto, M. D. (2012). *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan EViews*. Erlangga.
- Bararoh, T., & Prayitno, B. (2011). Analisis Faktor Transparansi Pemerintah dan Tingkat Pendidikan Masyarakat yang Mempengaruhi Korupsi di Kabupaten dan Kotamadya di Indonesia. *Equilibrium*, 9(2), 160–180. <https://journal.uwks.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/146>
- Bauhr, M., Czibik, Á., de Fine Licht, J., & Fazekas, M. (2019). Lights on the shadows of public procurement: Transparency as an antidote to corruption. *Governance*, 1–29. <https://doi.org/10.1111/gove.12432>
- Berita BPK. (2021). *Opini WTP Laporan Keuangan Pemda Alami Peningkatan*. bpk.go.id/news/opini-wtp-laporan-keuangan-pemda-alami-peningkatan
- Berita KPK. (2021). *Corruption Perception Index (CPI 2020, Skor Indonesia Menurun*. [https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/2040-corruption-perception-index-cpi-2020-skor-indonesia-menurun#:~:text=Corruption Perception Index \(CPI\) 2020%2C Skor Indonesia Menurun,-Berita KPK 01&text=Rilis CPI 2020 dari TI,ke-102 dari 180 negara](https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/2040-corruption-perception-index-cpi-2020-skor-indonesia-menurun#:~:text=Corruption Perception Index (CPI) 2020%2C Skor Indonesia Menurun,-Berita KPK 01&text=Rilis CPI 2020 dari TI,ke-102 dari 180 negara).
- Brusca, I., Manes Rossi, F., & Aversano, N. (2018). Accountability and Transparency to Fight against Corruption: An International Comparative Analysis. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 20(5), 486–504. <https://doi.org/10.1080/13876988.2017.1393951>
- Budiman, M. A., & Amyar, F. (2021). The effect of audit opinions, implementation of audit recommendations, and findings of state losses on corruption levels in the ministries and institutions of the Republic of Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(1), 113–129. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i1.471>
- Chen, C., & Neshkova, M. I. (2020). The effect of fiscal transparency on corruption:

- A panel cross-country analysis. *Public Administration*, 98(1), 226–243.
<https://doi.org/10.1111/padm.12620>
- Damiati, L. (2016). Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi. *UIN Syarif Hidayatullah*.
- De Asis, M. G. (2006). Reducing Corruption at the Local Level. *The World Bank Institute*, 1–21.
<http://web.worldbank.org/archive/website01006/WEB/IMAGES/REDUCING.PDF>
- Duadji, N. (2012). Good Governance Dalam Pemerintah Daerah. *Jurnal Sosial Dan Pembangunan MIMBAR*, 28(2), 201–209.
<https://doi.org/10.35724/mjpa.v1i2.1985>
- Effendy, Y. (2013). Tinjauan Hubungan Opini WTP BPK dengan Kasus Korupsi pada Pemda di Indonesia Kajian Manajemen Keuangan Pemerintah, Hubungan antara Masyarakat, Pemerintah dan Pemeriksa (Auditor). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 13(1), 46–55.
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/mbisnis/article/view/107/54>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Evans III, J. H., & Patton, J. M. (1987). Signaling and Monitoring in Public-Sector Accounting. *Journal of Accounting Research*, 25, 130–158.
<https://doi.org/10.2307/2491084>
- Gedeona, H. T. (2005). Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Sebuah Alternatif Pemberantasan Korupsi di Tingkat Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 2(3), 258–267.
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/655
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Halter, M. V., de Arruda, M. C. C., & Halter, R. B. (2009). Transparency to reduce corruption?: Dropping hints for private organizations in Brazil. *Journal of Business Ethics*, 84(3 SUPPL.), 373–385. <https://doi.org/10.1007/s10551-009-0198-6>
- Huefner, R. J. (2011). Fraud Risks in Local Government: An Analysis of Audit Findings. *Journal of Forensic & Investigate Accounting*, 3(3), 111–125.
- Ikhwan, A. N., Subroto, B., & Ghofar, A. (2016). The Influence of Accountability on Clean-corruption Perception in Local Government. *ASSETS: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 5(2), 89–100.
<http://doi.org/10.25273/jap.v5i2.1191>
- Isnadiva, S. M., & Haryanto. (2021). Hasil Pemeriksaan dan Kasus Korupsi pada Pemerintah Daerah Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2018. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 83–100.
<https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.28342>
- Jahja, J. S. (2012). *Say No to Korupsi!* (1st ed.). Visimedia.

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/10.2139/ssrn.94043>
- Khairudin, & Erlanda, R. (2016). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota se-Sumatera). *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 7(2), 137–154.
- Krina, L. L. (2003). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. *Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Kurniawati, A. D., & Pratama, Y. M. (2021). The role of government auditing in controlling the level of corruption in Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 25(1), 54–64. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol25.iss1.art6>
- Lindstedt, C., & Naurin, D. (2006). Transparency Against Corruption. *Goteborg University*, 1–38.
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control: Evidence from China's provincial panel data. *China Journal of Accounting Research*, 5(2), 163–186. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Masyitoh, R. D., Wardhani, R., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. *Simposium Nasional Akuntansi, XVIII*, 1–26.
- Peisakhin, L., & Pinto, P. (2010). Is transparency an effective anti-corruption strategy? Evidence from a field experiment in India. *Regulation and Governance*, 4(3), 261–280. <https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2010.01081.x>
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2. (2017). *Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan*.
- Peraturan BPK Nomor 1. (2017). *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1. (2010). *Standar Layanan Informasi Publik*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71. (2010). *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. (2012). Why Anticorruption Reforms Fail- Systemic Corruption as a Collective Action Problem. *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2012.01604.x>
- Pramesti, L., & Haryanto, H. (2019). Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 298–308. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p298>
- Puspita, R., & Martani, D. (2012). Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik

- Pemda terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, 1–26. <https://doi.org/10.7775/rac.v84.i1.7932>
- Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2017). Pengaruh Tata Kelola Dan E-Government Terhadap Korupsi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(4), 431–450. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>
- Ramadhan, A. (2021). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 Turun Jadi 37, Peringkat 102 di Dunia*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-di>
- Rikafitri, R., Lindrianasari, & Komalasari, A. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan pada Website Pemerintah Daerah di Indonesia. *Prosiding Penelitian Bidang Ekonomi-Bisnis Serta Pembangunan Masyarakat*. <https://doi.org/10.21070/2019/978-602-5914-62-1>
- Rini, R., & Damiati, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 73–90. <https://doi.org/10.24815/jdab.v4i1.4933>
- Rini, R., & Sarah, A. (2014). Opini Audit Dan Pengungkapan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serta Kaitannya Dengan Korupsi Di Indonesia. *Etikonomi*, 13(1), 1–20. <https://doi.org/10.15408/etk.v13i1.1875>
- Spence, M. (1973). Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374. <https://doi.org/10.1055/s-2004-820924>
- Suhardjanto, D., Djuminah, & Agustiningsih, S. W. (2020). Regional Financial Performance, Audit Findings, and Corruption Levels in Indonesia. *JAB Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 81–90.
- Tahir, A. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 2, Issue 2). Alfabeta. <https://kominfo.kotabogor.go.id/asset/images/web/files/buku-2.-masterplan-smart-city-kota-bogor.pdf>
- Tehupuring, R. (2018). Unqualified Opinion and Level of Corruption: The Triangulation Approach. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 1–20.
- Triwibowo, S. (2019). Pengelolaan Keuangan Publik dan Korupsi di Indonesia: Kointegrasi Panel dan Analisis Kausalitas. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 34(3), 267–279. <https://doi.org/10.4324/9781351136389-8>
- Umar, H. (2011). Peran Akuntan dalam Pemberantasan Korupsi. *Sosiohumaniora*, 13.
- Umar, H. (2012). Pengawasan untuk Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(2), 109–122.
- Undang-undang Nomor 14. (2008). *Keterbukaan Informasi Publik*.

- Undang-undang Nomor 20. (2001). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Utomo, W. P., Diana, N., & Afifudin. (2018). Pengaruh Opini Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Tingkat Korupsi (Studi pada Kementerian/Lembaga di Indonesia). *E-JRA Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 07(05), 51–64.
- Warkini, Bawono, I. R., & Restianto, Y. E. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi LKPD Berpengaruh terhadap kasus korupsi: benarkah? *Akuntansi Dewantara*, 4(2), 113–127. <https://doi.org/10.26460/AD.v4i2.8046>